

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
PELAKSANAAN TATA KELOLA	3
Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola.....	3
TRANSPARASI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNMENT (GCG)	4
1. Umum	4
2. Susunan Pengurus	5
3. Struktur Organisasi	6
4. Komponen Sumber Daya Manusia	7
5. Pelaksanaan GCG Berdasarkan Hasil <i>Self Assesment</i>	7
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ..	7
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	8
C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Eksternal	9
D. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern	10
E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Related Party</i>) atau BPMK.....	11
F. Rencana Strategi Bank.....	12
G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan.....	13
6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi.....	13
7. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	13
8. Paket Atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi.....	13
9. Shares Option.....	13
10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	14
11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	14
12. Jumlah Penyimpanan atau <i>Fraud</i>	14

13.	Permasalahan Hukum.....	14
14.	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	14
15.	Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Politik.....	14
	KESIMPULAN UMUM.....	15
	LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
A.	Hasil <i>Self Assessment</i>	Error! Bookmark not defined.

PELAKSANAAN TATA KELOLA 2018

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola

BPR menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (CCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan di BPR ditujukan antara lain untuk:

- Mendukung visi BPR, untuk menjadi "Menjadi Bank yang Sehat Berkembang dan Terpercaya".
- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- Memberikan manfaat dan nilai tambah (added value) bagi para pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable).

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa mendatang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

TRANSPARASI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNMENT (GCG)

1. Umum

PT. BPR Enggal Makmur Adi Santoso – Kendal didirikan berdasarkan akta nomor 135 tanggal 16 Juni 1990 oleh Notaris Liliana Tedjosaputro, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 5 Agustus 1991 nomor : C2-3617 HT.01.04.TH.91, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.306/KM.13/1991, tertanggal 7 Oktober 1991. PT BPR Enggal Makmur Adi Santoso Kendal beralamat di Jalan Raya Kaliwungu No 300 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

Modal Bank

Modal dasar PT. BPR Enggal Makmur Adi Santoso – Kendal sejumlah Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) dari modal dasar tersebut telah di tempatkan dan di setor berdasarkan Akta No. 5 tanggal 10 Juli 2018 dengan Akta No 24 tanggal 29 Januari 2018 dengan Notaris Maria Yosefa Deni, SH PT. BPR Enggal Makmur Adi Santoso – Kendal Sejumlah Rp 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) terbagi atas 5.600,- (lima ribu enam ratus rupiah) telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Metri Hukum dan HAM No AHU-AH.01.03-03-0220492 Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018 dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Adapun susunan pemegang saham tahun 2018 sebagai berikut :

- Stefanus JJ Batihalm	2.800 saham	Rp 2.800.000.000
- Santi Kusumawati	2.800 saham	Rp 2.800.000.000
		<hr/>
		Rp 5.600.000.000

2. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus PT. BPR. Enggal Makmur Adi Santoso – Kendal per 31 Desember 2014 dari Akte No 03 tanggal 08 Januari 2008, Akte No 32 tanggal 27 September 2011 dengan notaris yang sama Roekiyanto, SH dan dengan perubahan akte No 43 tanggal 25 Oktober 2011 oleh Notaris Roekiyanto, SH. Dalam tahun 2014 telah terjadi pengunduran diri Dewan Direksi yaitu Direktur Utama atas nama Venasius Sisworo Pujianto SE, dengan Akte No 41, tanggal 25 September 2014 Notaris Maria Yosefa Deni, SH. Dan Direktur atas nama Wahyu Mustikasari dengan Akte No 6 tanggal 5 Desember 2014 Notaris Maria Yosefa Deni, SH Semarang, Susunan Dewan Komisaris berdasarkan akta No 24 tanggal 29 Januari 2018 dengan Notaris Maria Yosefa Deni, SH, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Andreas Handoyo/Tjan Hok Liang

Komisaris : Renny Liestyawati

Namun dalam terjadi kesalahan internal sehingga posisi hingga berakhirnya tahun kerja 2018 susunan Dewan Komisaris menjadi kosong.

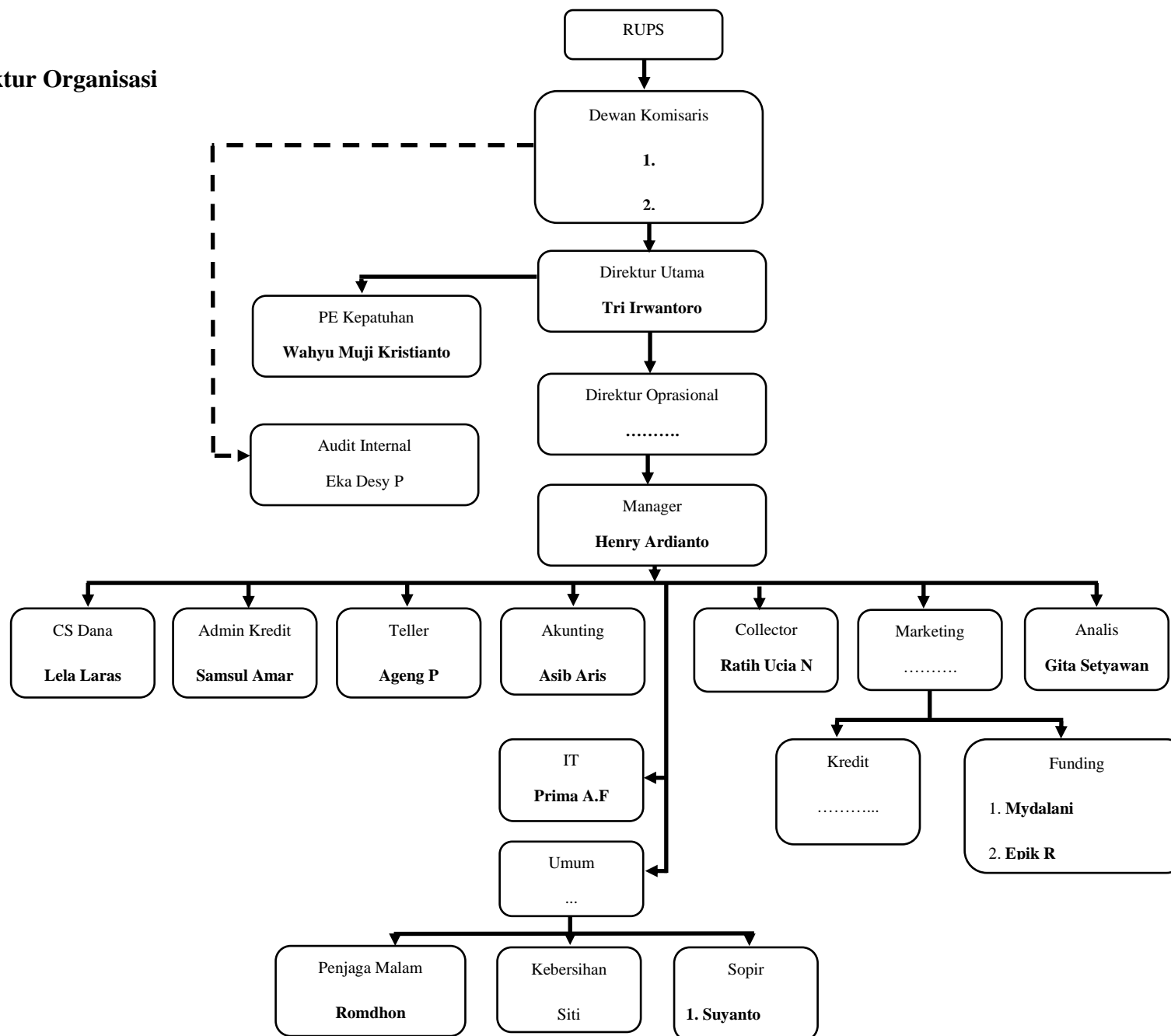
Susunan Direksi berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan berdasarkan Akta No 24 Tanggal 29 Januari 2018 dengan Notaris Maria Yosefa Deni, SH Semarang sebagai berikut :

Dewan Direksi

Direktur Utama :

Direktur : Tri Irwantoro

3. Struktur Organisasi



4. Komponen Sumber Daya Manusia

Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Ikatan Kerja	Jumlah
Staff	12	SMP	3	Kontrak	13
Manager / PE	3	SMA	3	Tetap	5
Direksi	1	D3	2		
Komisaris	2	S1	9		
		S2	1		
TOTAL	18	TOTAL	18	TOTAL	18

5. Pelaksanaan GCG Berdasarkan Hasil *Self Assesment*

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Terdapat 2 komite yang diterapkan di BPR EMAS,

1. Komite Kredit

Komite Kredit telah berjalan sebagaimana tugasnya, dimana dalam komite kredit terdiri dari beberapa bidang kerja diantara lain :

- a. AO
- b. Analis Kredit
- c. Penagihan
- d. Manager
- e. Direksi

2. Komite Biaya

Komite biaya yang terdiri dari

- a. CS/Admin Kredit/Teller/Bidang yang berkaitan
- b. Manager
- c. Audit Internal (Memantau jalannya komite dan mengawal)
- d. Direksi

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Eksternal

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank belum seluruhnya patuh terhadap ketentuan internal dan external termasuk pemenuhan terhadap hasil temuan audit OJK, sehingga perlu peningkatan kualitas sumberdaya untuk perbaikan kinerja bank.

2. Audit Internal

Audit Internal telah berjalan sebagaimana fungsi tugasnya namun penyelenggaraan audit belum sepenuhnya menyeluruh. Hasil audit internal ada beberapa ketentuan yang dilanggar baik yang sudah diselesaikan maupun masih dalam status pantau oleh audit internal.

No	Bidang	Hasil Temuan	Ketentuan yang dilanggar	Komitmen
1	Kredit	1. Terdapat 15 Debitur dengan data tidak lengkap, baik kekurangan tanda tangan dari direksi sampai dengan hasil analisa	Prosedur Kredit Pinjaman (revisi-02)	Telah diselesaikan
		2. Penyimpangan Ketentuan Kredit baik suku bunga, Provisi, administrasi hingga jangka waktu telah dilengkapi dengan Memo Deviasi pada setiap lembar file kredit.		

3. Audit Eksternal

Tahun kerja 2018 telah dilakukan audit external oleh Kantor Akuntan Publik dengan surat penunjukan no SU/04/BPR-EMAS/II/2019 dan RUPS nomor 02/BPR-EMAS/II/2019. Serta diikat kerjasama dengan nomor SPK/02/FEBRUARI/2019. Hasil audit melalui manajemen leter menegaskan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan.

4. Penyimpangan Terhadap Undang-Undang

Tidak terjadi penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia

5. Penyimpangan Terhadap Otoritas atau Legulator Keuangan

Regulator	Jumlah Pelanggaran	Saksi	Status
OJK	6	Denda	Selesai
BI	-	-	-
LPS	-	-	-
PPATK	-	-	-
Lainnya	-	-	-

D. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksplorur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko

secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.

- PT. BPR EMAS sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3. Sistem Pengendalian Intern

- Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester.

E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPKM

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPKM dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BPKM yang besarnya menyesuaikan KPMM disetiap bulannya.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BPKM kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

a. Kredit

No	Penyedia Dana	Debitur	Nominal (juta)	Total Bakidebet Kredit	Prosentase Nominal / Bakidebet
1	Terkait	1	110	30.605	0,37%
2	Debitur Inti	25	17.011	30.605	55%
3	Kelompok	17	7.221	30.605	23,60%

b. Tabungan

No	Penyedia Dana	Debitur	Nominal (juta)	Total TABUNGAN	Prosentase Nominal / Tab
1	Terkait	14	2.775	3.294	84%
2	Debitur Inti	25	1.348	3.294	40%
3	Kelompok	13	320	3.294	9,7%

c. Deposito

No	Penyedia Dana	Debitur	Nominal (juta)	Total DEPOSITO	Prosentase Nominal / Deposito
1	Terkait	14	3.693	20.359	18,1%
2	Debitur Inti	25	10.597	20.359	52%
3	Kelompok	5	1.751	20.359	8.6%

F. Rencana Strategi Bank

Bank merencanakan strategi untuk meningkatkan komitmen agar bank tumbuh sehat dan terus dapat bersaing di mana telah disusun perencanaan sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

- a. Bank melakukan ekspansi kredit untuk menekan NPL dan menghasilkan laba.
- b. Bank melakukan langkah pelepasan agunan nasabah bermasalah yang potensial
- c. Bank melakukan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan nasabah hapus buku untuk menyelesaikan kewajibannya.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan diadakannya pelatihan atau pendidikan.
- e. menganalisa peta persaingan dan membuat kebijakan dan langkah-langkah strategis mengenai pendanaan bagi UMKM dan peningkatan sumber pendanaan dari simpanan.

2. Jangka Menengah

- a. Bank melakukan penambahan Modal Disetor guna mempersiapkan penghapusan buku nasabah bermasalah
- b. Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah
- c. Perluasan area pasar produk bank
- d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

1. Bank telah memiliki ketentuan internal mengenai transparansi keuangan dan pengaduan nasabah
2. Bank telah melakukan publikasi keuangan dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. telah disampaikan kepada regulator, ditempel pada papan informasi sehingga dapat diakses oleh publik.
3. Laporan kondisi keuangan maupun tata kelola sudah disampaikan kepada pihak independen dalam hal ini adalah perbarindo melalui aplikasi Sistem Informasi Perbarindo (SIP)

6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Enggal Makmur Adi Santoso tidak memiliki saham pada BPR, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

7. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara anggota dewan komisaris dan dewan direksi.

8. Paket Atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi dewan komisaris dan direksi dituangkan dalam RUPS Nomor 002/RUPS/BPR-EMAS/VII/2018 dan tidak terdapat fasilitas lain yang diterima.

9. Shares Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif (PE) yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran lainnya dalam rangka kompensasi yang diberikan kepada Komisaris, Direksi dan PE.

10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Secara rinci adalah sebagai berikut :

Direksi (tertinggi)	Komisaris (tertinggi)	Ratio
11.250	5.000	1 : 2.2
Direksi (teringgi)	Karyawan (teringgi)	Ratio
11.250	8.250	1 : 1.36
Direksi (tertinggi)	Karyawan (terendah)	Ratio
11.250	900	1 : 14
Karyawan (tertinggi)	Karyawan (terendah)	Ratio
8.250	900	1 : 9.1

11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Frekuensi Kehadiran		Keterangan
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	
Andreas Handoyo	Komisaris Utama	12	12	-
Renny Liestyawati	Komisaris	12	12	-

12. Jumlah Penyimpanan atau *Fraud*

Penyimpangan, kecurangan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau kelompok tidak terjadi pada bank.

13. Permasalahan Hukum

Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh bank pada tahun 2018.

14. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

15. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Politik

Tidak ada pemberian uang untuk kepentingan sosial dan politik

KESIMPULAN UMUM

Dengan demikian kesimpulan atas kinerja tata kelola PT BPR Enggal Makmur Adi Santoso belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Secara kesehatan bank, BPR telah mencatatkan peningkatan kualitas yang baik. Namun pada Sumber Daya Manusia (SDM) masih banyak terjadi kesalahan, baik yang disengaja dan tidak disengaja sehingga mengakibatkan persoalan dikemudian hari. Dari pemenuhan terhadap ketentuan dan komitmen, apabila ditelaah tahun 2018 telah mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun perlu menjadi catatan bagi kami bahwa perbaikan yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Segi risiko bank, bank belum memiliki ketentuan yang ditaati dan menjadi parameter baku untuk memantau risiko yang timbul akibat kegiatan perbankan. Tercermin dari beberapa denda yang masuk akibat kesalahan internal (operasional), gagal bayar dan banyaknya asset kredit yang dihapus bukukan (kredit).